BANDAR BETSY : JEJAK PKI DI TANAH BATAK PADA TAHUN 1965

Rizki P.I.Hutagaol[1], Etmi Hardi[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : rizkihutagaol@gmail.com[1], etmihardi@fis.unp.ac.id[2]

ABSTRACT

This study examines the uprising in Bandar Betsy, Bandar Huluan District, Simalungun Regency, North Sumatra, in 1965. The conflict stemmed from agrarian inequality following the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA) of 1960, which was used by the Indonesian Peasants' Front (BTI), an underbouw of the Indonesian Communist Party (PKI), to mobilize farmers to seize state-owned plantation land. The climax occurred on May 14, 1965, when BTI-led farmers occupied Bandar Betsy Plantation, leading to a violent clash with security forces that resulted in the death of Lieutenant Sujono.The aim of this research is to reconstruct the chronology of the uprising and to analyze the involvement of the PKI in the farmers' movement. The study applies historical methods consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected from archives, literature, and oral interviews with eyewitnesses, some of whom remained anonymous for confidentiality reasons. The findings reveal that the incident at Bandar Betsy was not merely a spontaneous farmers' action but closely linked to PKI's political mobilization through BTI. The local agrarian dispute thus developed into a broader political conflict, reflecting the intersection of land struggles, ideological interests, and state power during the turbulent year of 1965.

Keywords : *Bandar Betsy, PKI, BTI, Agrarian Conflict, Political History*

PENDAHULUAN

Peristiwa 1965 menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia, yang diwarnai pertentangan ideologi antara Pancasila dan komunisme. Partai Komunis Indonesia (PKI), yang sejak awal abad ke-20 berkembang melalui organisasi buruh dan tani, menjadikan isu agraria sebagai basis penguatan pengaruh politik. Barisan Tani Indonesia (BTI) sebagai underbouw PKI memainkan peran penting dalam memobilisasi petani untuk melakukan aksi sepihak atas lahan perkebunan negara. Salah satu peristiwa penting yang merefleksikan dinamika tersebut terjadi di Bandar Betsy, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 14 Mei 1965(Tahun et al. 1965). Ketegangan agraria yang dipicu oleh implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 berujung pada aksi perebutan lahan yang menewaskan Letda Sujono, dan kemudian menjadi simbol keterlibatan PKI dalam gerakan petani di daerah.

Penelitian mengenai konflik 1965 telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Sulistyo meneliti pembantaian di Kediri dan Jombang dalam Palu Arit di Ladang Tebu(Sulistiyo 2001). Ashshiddiq mengkaji peristiwa Minggir di Sleman(Tahun et al. 1965), sedangkan M.K. Nasution menyoroti peran BTI dalam memperluas basis PKI di Jawa Tengah. Penelitian Limbong mengenai reklaiming lahan di Bandar Betsy mengungkap akar panjang konflik agraria sejak masa kolonial, sementara Fadilla Triana menyoroti dampak peristiwa 1965 terhadap stabilitas sosial Bandar Betsy. Kajian-kajian ini menunjukkan pola yang serupa: konflik agraria yang diwarnai mobilisasi politik PKI.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan konsep konflik agraria untuk menjelaskan ketimpangan penguasaan lahan yang menjadi pemicu aksi sepihak. Teori gerakan tani membantu memahami bagaimana BTI berperan dalam pengorganisasian petani(Alfarius 2023). Sementara itu, perspektif konflik politik dipakai untuk menafsirkan keterhubungan antara gerakan agraria lokal dan dinamika nasional menjelang G30S/PKI. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengangkat kembali sejarah lokal yang sering terpinggirkan dari narasi besar peristiwa 1965. Bandar Betsy bukan sekadar lokasi peristiwa agraria, tetapi juga ruang di mana konflik tanah berubah menjadi konflik politik dan kekerasan negara. Penelitian ini berfokus pada dua hal: pertama, menganalisis kronologi pemberontakan petani dan perebutan lahan pada 14 Mei 1965; kedua, menelaah sejauh mana keterlibatan PKI dalam mengarahkan aksi tersebut. Manfaat penelitian ini terbagi ke dalam aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan memperkaya historiografi Indonesia dengan menambahkan perspektif lokal ke dalam studi peristiwa 1965. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pendidikan sejarah untuk memperkenalkan dinamika konflik agraria dan politik di Sumatera Utara, serta sebagai bahan refleksi kritis mengenai relasi antara negara, petani, dan ideologi pada masa transisi politik Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis dan lisan. Data tertulis diperoleh melalui arsip perusahaan PTPN III, dokumen resmi pemerintah, serta literatur terkait di perpustakaan daerah. Sementara itu, data lisan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan saksi mata peristiwa Bandar Betsy tahun 1965.

Tidak semua narasumber bersedia disebutkan identitasnya secara terbuka, sehingga peneliti menggunakan sistem anonim seperti “Informan A” atau “saksi mata” untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan.

Tahap kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian dan kebenaran informasi. Kritik ekstern digunakan untuk memverifikasi otentisitas dokumen, sedangkan kritik intern dipakai untuk menilai keakuratan isi dengan membandingkan berbagai sumber. Proses ini memastikan bahwa data yang dipakai memiliki validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah itu, tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data yang telah lolos kritik. Peneliti menghubungkan arsip, wawancara, dan publikasi media ke dalam satu alur yang menjelaskan akar konflik agraria di Bandar Betsy, keterlibatan BTI sebagai organisasi underbouw PKI, serta perkembangan situasi politik lokal yang berubah menjadi bagian dari dinamika nasional menjelang peristiwa 30 September 1965.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan narasi sejarah berdasarkan hasil analisis. Fakta-fakta yang diperoleh tidak hanya disajikan sebagai kronologi, tetapi juga diinterpretasikan secara kritis untuk membentuk pemahaman menyeluruh tentang jejak PKI di Bandar Betsy. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis, logis, dan ilmiah mengenai keterhubungan antara persoalan agraria lokal dengan politik nasional pada tahun 1965.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan agraria di Bandar Betsy dimulai dari perubahan fungsi lahan. Dahulu lahan itu dikuasai oleh PTPN, sebuah perusahaan negara Belanda. Setelah itu, pemerintah Indonesia mengambil alih. Kelompok tani kemudian mengklaim hak atas tanah tersebut. Hal ini membuat situasi semakin rumit. Wilayah Bandar Betsy menjadi sumber ketegangan antara kepentingan negara dan keinginan petani lokal.(Limbong 2013)

Ketimpangan distribusi lahan di Bandar Betsy menunjukkan masalah struktural nasional. Pemerintah Orde Lama, di bawah Presiden Soekarno, meluncurkan program *Landreform* sesuai UUPA 1960. Namun, pelaksanaannya di daerah-daerah seperti Bandar Betsy penuh gesekan, yang menimbulkan pemberontakan. Di Bandar Betsy dan sekitarnya, BTI mulai aktif mengadakan konsolidasi di kalangan petani. Mereka mengadakan pertemuan di desa-desa, membagikan selebaran politik, dan melatih petani-petani muda. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kesadaran politik mengenai hak atas tanah dan membangun semangat revolusioner di kalangan rakyat kecil(Alfarius 2023)

Hal ini memnjadi acuan masyarakat sekitar bandar betsy yang ingin melakukan pemberontakan. UUPA No.5 Tahun 1960 mengatur pembatasan hak guna lahan , sehingga para pemilik tanah yang memilki tanah berlebih diwajibkan menyerahkan tanah kepada kelompok tani yang tidak memiliki tanah untuk Bertani .(Maladi 2013)

Pada tanggal 14 Mei, terjadi bentrokan antara petani dan pihak perusahaan. Aparat keamanan membantu perusahaan, tapi kesulitan membubarkan massa. Pihak perusahaan mengalami kerugian dan kehilangan kendali atas lahan inti. Aksi ini menarik perhatian pemerintah daerah dan pusat. Ini menjadi titik balik dalam relasi petani–negara di kawasan tersebut. Keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam peristiwa Bandar Betsy terlihat melalui dukungan terhadap Landreform dan aksi-aksi petani. Organisasi sayap PKI, BTI, menjadi alat penyebaran ideologi dan pengorganisasian massa tani. Bukti awal keterlibatan PKI meliputi

dokumen internal BTI, kehadiran aktivis dari luar untuk pengarahan, serta simbol politik kiri dalam orasi dan pamflet. Namun, tidak semua petani di Bandar Betsy adalah anggota PKI.

Menjelang aksi pada 14 Mei 1965, BTI mulai mengorganisir persiapan untuk aksi massa. Beberapa hari sebelum tanggal tersebut, kabarnya ada pertemuan besar yang dihadiri sekitar 200 petani dari berbagai kampung. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk melakukan aksi perebutan tanah secara serentak dan masif di lahan-lahan yang dianggap "tidak produktif" milik PTPN Bandar Betsy.

Para petani dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, masing-masing dengan koordinator lapangan, beberapa di antaranya diduga adalah anggota atau simpatisan PKI. Tugas mereka meliputi: merencanakan logistik aksi, mengatur waktu pelaksanaan, dan menentukan titik-titik konsentrasi massa. Alat pertanian dan perlengkapan tenda sudah dipersiapkan beberapa hari sebelum hari-H. Aksi dimulai sejak pagi. Ratusan petani dengan membawa cangkul, parang, dan pacul berkumpul di Balai Sumber Sari untuk segera memasuki perkebunan Bandar Betsy. Mereka menduduki beberapa lahan kosong, mendirikan pondok-pondok, dan mulai membuka lahan untuk ditanami. Sebagian bahkan menancapkan bendera BTI sebagai simbol penguasaan.

Dalam orasi salah satu koordinator, dinyatakan bahwa "tanah ini milik rakyat, bukan milik perusahaan negara." Slogan-slogan seperti "Landreform Revolusioner" dan "Tanah untuk yang Menggarap" terus bergema sepanjang hari. Aksi ini juga sempat mendapat perlawanan dari petugas keamanan perkebunan, tetapi karena dilakukan di berbagai titik sekaligus, para aparat kewalahan. Kemudian aksi para simpatisan BTI mulai menanami lahan dengan berbagai jenis tanaman. Dalam hal ini tanaman yang dimaksud adalah ubi, jagung, danb pisang. Disaat perisitwa ini berlangsung, Letda Sujono memeriksa tractor yang terjebak di kubangan lumpur.

Disaat melakukan patrol Letda Sujono melihat masa sedang melakukan aksi penanaman yang dilakukan di lahan yang kini menajdi milik PTPN III tersebut. Saat itu pula Letda Sujono menegur dan bertindak melarang untuk tidak menanami lahan tersebut. Hingga anggota dari Barisan Tani Indonesia ingin merampas helm milik nya, spontan Letda Sujono langsung memukul salah seorang dari anggota Barisan Tani Indonesia itu.melihat hal itu anggota dari Barisan Tani Indonesia membalas dengan menyerang balik tubuh Letda Sujono hingga ia jatuh tersungkur.

Untuk memahami bagaimana PKI terlibat dalam peristiwa Bandar Betsy, kita perlu melihat dulu konteks nasional pada awal tahun 1960-an. Di masa itu, PKI berada di puncak kekuatannya dengan jutaan anggota dan pengaruh yang besar di berbagai aspek sosial-politik Indonesia. Salah satu fokus utama mereka adalah isu agraria, yang jelas sangat relevan bagi kehidupan banyak orang di Indonesia.

PKI memandang ketimpangan agraria sebagai bentuk penindasan yang berasal dari warisan kolonial. Mereka pun mendorong pelaksanaan Landreform secara radikal dan menggalang kekuatan melalui organisasi-organisasi bawah tanah seperti BTI (Barisan Tani Indonesia).

Di Bandar Betsy dan sekitarnya, BTI mulai aktif mengonsolidasikan massa petani. Mereka mengadakan rapat-rapat tani di desa-desa, menyebarkan selebaran politik, dan melatih petani muda. Tujuannya, membangun kesadaran politik mengenai hak atas tanah dan menumbuhkan semangat revolusioner di kalangan rakyat. Kegiatan BTI tidak hanya berfokus pada ideologi, tetapi juga pada tindakan nyata. Mereka membantu petani membuat petisi tanah, menyusun peta penguasaan lahan, dan mendesak kepala desa untuk mencatat nama-nama petani yang berhak atas redistribusi tanah. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan membentuk panitia pelaksana Landreform di tingkat lokal, meskipun belum diakui secara resmi oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini berupaya mengungkap kembali jejak sejarah peristiwa di Bandar Betsy, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, pada tahun 1965 sebagai salah satu bentuk konflik agraria yang berkelindan dengan dinamika politik nasional. Berdasarkan hasil studi pustaka, arsip, dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa akar peristiwa ini tidak semata-mata terletak pada ideologi, melainkan pada persoalan ketimpangan agraria yang sudah mengendap sejak masa kolonial Belanda. Ketika Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 diterbitkan, harapan petani untuk memperoleh lahan yang lebih adil justru berhadapan dengan lambannya pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) — organisasi underbouw PKI — untuk memobilisasi petani melakukan aksi sepihak di Bandar Betsy pada 14 Mei 1965.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarius, Willy. 2023. "Barisan Tani Indonesia (BTI) Pada Masa Revolusi Indonesia, 1945-1950." *Lembaran Sejarah* 19 (1): 78. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.90299.

Limbong, Sutan Hasudungan. 2013. "Konflik Hak Guna Usaha P.T. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy Di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun," 1–90.

Maladi, Yanis. 2013. "Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25 (1): 27. https://doi.org/10.22146/jmh.16108.

Sulistiyo, Hermawan. 2001. "Palu Arit Di Ladang Tebu. Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (1965-1966)." *Archipel* 61 (1): 214–16.

Tahun, Sleman, Ahmad Abdul, Wahid Ashshiddiq, I N Sendangmulyo Village, Minggir District, and Sleman Regencyon. 1965. "PERISTIWA MINGGIR : AKSI SEPIHAK BARISAN TANI INDONESIA DI DESA SENDANGMULYO , KECAMATAN MINGGIR , KABUPATEN," 29–43.

.